



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SUKABUMI**

2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 – 2013, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi yang ditetapkan adalah ***“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN , KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL UNTUK KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”***. Dijabarkan menjadi tiga Misi, yaitu :

- a. Optimalisasi Pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
- b. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi. Kami sadar

bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tahun 2009 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta untuk mewujudkan Good Governance secara normatif telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kewenangan dan kelembagaan yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, yang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003;
3. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor I Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2004 antara lain menetapkan pengaturan mengenai Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi sebagai Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi.

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan system serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan stratejik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2008.

## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D-20);
- d. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007;
- e. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
- f. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Sukabumi Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 30 Seri E-5);

- g. Surat Walikota Sukabumi Nomor 130.04/1477/Tapem Tanggal 11 Desember 2008 Perihal Penyusunan LKPJ dan LAKIP Tahun 2008 Selama Tahun 2008.

### **1.3. Organisasi**

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota No. 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi, maka Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi dibantu oleh jajaran struktural :

**a. Sekretaris**, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Program

**b. Bidang Penagihan dan Penyuluhan**, membawahi :

- 1) Seksi Penyuluhan dan Piutang
- 2) Seksi Penagihan
- 3) Seksi bagi hasil pajak dan bukan pajak

**c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan**, membawahi :

- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
- 3) Seksi Penetapan dan Keberatan

**d. Bidang Anggaran**, membawahi :

- 1) Seksi Perencanaan Anggaran
- 2) Seksi Anggaran Penerimaan
- 3) Seksi Anggaran Pengeluaran

**e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :**

- 1) Seksi Tata Perbendaharaan
- 2) Seksi Perbendaharaan Penerimaan
- 3) Seksi Perbendaharaan Pengeluaran

**f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :**

- 1) Seksi Pelaporan dan Verifikasi
- 2) Seksi Akuntansi Penerimaan
- 3) Seksi Akuntansi Pengeluaran

**g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :**

- 1) Seksi Pengelolaan & Pemeliharaan Aset Bergerak
- 2) Seksi Pengelolaan & Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak
- 3) Seksi Inventarisasi Aset

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 100 (seratus) orang, terdiri dari :

- |                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| a. Jabatan Struktural | : | 29 Orang |
| b. Staf / PNS         | : | 68 Orang |
| c. Honorer            | : | 3 Orang  |

Adapun komposisi pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- |                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| 1. Tingkat Pendidikan | : |          |
| a. S 2                | : | 6 Orang  |
| b. S 1                | : | 26 Orang |
| c. D 3                | : | 6 Orang  |
| d. S L T A            | : | 53 Orang |
| e. S L T P            | : | 6 Orang  |
| f. S D                | : | 0 Orang  |

2. Jenis Kepegawaian :

Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 94 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil 3 orang dan Pegawai Harian / Kontrak Kerja sebanyak 3 orang.

3. Jenis Kelamin :

Kemudian dari sejumlah Pegawai itu sebanyak 71 orang Laki-laki dan 29 Orang Perempuan.

4. Golongan Umur :

Mayoritas Pegawai adalah pada kelompok umur 31 s/d 40 Tahun sebanyak 34 Orang, umur 41 s/d 50 Tahun sebanyak 33 Orang, umur 51 s/d 60 Tahun 23 Orang, dan umur minoritas adalah pada kelompok umur 21 s/d 30 Tahun sebanyak 6 Orang. Adapun pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2009 sebanyak 2 Orang.

5. Pangkat / Golongan :

Mayoritas PNS yaitu 20 orang pada golongan III/a dan 20 orang pada Golongan III/a; selanjutnya pada golongan IV/c 1 orang; golongan IV/b 2 orang; golongan IV/a 2 orang; golongan III/d 8 orang; golongan III/c 5 orang; golongan III/b 18 orang; golongan II/d 2 orang; golongan II/c 7 orang; golongan II/b 7 orang; golongan I/c 4 orang; dan golongan I/a 1 orang.

6. Masa Kerja Pegawai :

Mayoritas PNS yaitu sebanyak 40 orang memiliki masa kerja antara 0 – 5 tahun; sebanyak 9 orang memiliki masa kerja antara 6 – 10 tahun; 12 orang antara 11 – 15 tahun; 8 orang antara 16 – 20 tahun; 22 orang antara 21 – 25 tahun; 5 orang antara 26 – 30 tahun; dan masa kerja antara 31 – 35 tahun sebanyak 1 orang.

#### **1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas**

Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2004 tentang kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah :

**a. Tugas Pokok :**

Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah.

**b. Fungsi :**

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- 2) Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.
- 4) Pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah

**1.5. Aspek – aspek Strategik Organisasi**

Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategik organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Dengan kemampuan Sumber Daya Manusia maka akan dapat disinergikan untuk menggali potensi yang ada (lama dan baru);
- b. Dengan Sumber Daya Manusia yang handal akan dapat didayagunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi;
- c. Dengan kewenangan dan kemampuan Sumber Daya Manusia akan meningkatkan kredibilitas untuk menarik investor baru, khususnya Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- d. Dengan kemampuan dan kewenangan Sumber Daya Manusia serta dukungan pendanaan yang memadai maka dapat melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi organisasi kepada masyarakat;
- e. Sumber Daya Manusia yang pro aktif dalam pemungutan Pajak dan Retribusi akan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia merupakan kebutuhan untuk menggali potensi dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi;
- g. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk pembinaan kepada masyarakat, merupakan prasyarat pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi

## **1.6. Sistematika**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2009 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	RENCANA STRATEGIK
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II RENCANA STRATEGIK**

Dengan diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

### **2.1. RENCANA STRATEGIK**

Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi disusun mengacu kepada Perda Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003, tentang Renstra Kota Sukabumi 2008-2013, dengan mengartikulasikan Visi : ***Sebagai pusat jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan sampai tahun 2015*** yang diwujudkan secara bertahap melalui Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008-2013 yaitu ***Mewujudkan Pemerintahan Amanah, dalam Kerangka membangun Kota Sukabumi yang Sejahtera.***

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi menggunakan metode Deskriptif dan Induktif/Analitik dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literature. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi secara Implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## 1. VISI

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kota Sukabumi”, karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Kota tersebut.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan adalah ***“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”***

Kata kunci dari Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan Bidang nya yang diharapkan dapat menyokong Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan. Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategik.

## 2. MISI

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan standar pelayanan.

### 3. TUJUAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja CSF (faktor-faktor penentu keberhasilan) suatu organisasi.

Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan CSF yang telah digariskan maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Misi 1** : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

**Tujuannya** : Meningkatkan Suatu Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Yang Akuntabel dan Profesional.

**Sasarannya** : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas penggunaan Anggaran yang seimbang dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada Kepentingan Publik.

**Misi 2** : Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.

**Tujuannya** : Peningkatan Pendapatan Daerah yang Sinergitas dan Realistis.

**Sasarannya** : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah.

**Misi 3** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

**Tujuannya** : Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdedikasi Tinggi, bertanggung jawab serta memiliki Wawasan dan Keterampilan.

**Sasarannya**: Meningkatnya Wawasan dan Keterampilan dalam Pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### 4. STRATEGI

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program.

Program kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kota Sukabumi yang tertuang dalam RENSTRA Kota 2008-2013 yang diarahkan pada :

1. Pemantapan kembali Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi;
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Menjalin kerjasama dan kemitraan Pemerintah dan Swasta;
4. Peningkatan Pendapatan Daerah.

Berpedoman dari arahan tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi menetapkan cara mencapai tujuan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang seimbang dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan Publik;
2. Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah;
3. Meningkatnya Wawasan dan Keterampilan dalam Pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) kebijakan :

- a. Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Administrasi Perkantoran;
- c. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan SKPD yang Transparan dan Akuntabel yang tersaji dalam suatu Proses Manajemen sebagai penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- d. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana sebagai Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- e. Sistem Pengelolaan Pendapatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi Makro dan Mikro;

- f. Mengembangkan Potensi Kemampuan Personil sesuai bidang dan Tanggung Jawabnya serta penerapan Reward and Punishment terhadap Prestasi Kerja yang terukur.

## **2.2. RENCANA KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan didukung 12 Kegiatan, yaitu:
  - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
  - 1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - 1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 1.8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan;
  - 1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan;
  - 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 1.12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung 6 kegiatan yaitu :
  - 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - 2.3. Pengadaan Tanah;
  - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
  - 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional;
  - 2.6. Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair.

3. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS didukung 2 Kegiatan, yaitu :
  - 3.1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
  - 3.2. Pemindahan Tugas PNS.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
  - 4.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian Kinerja Keuangan, didukung 4 Kegiatan yaitu :
  - 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
  - 5.3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
  - 5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung 17 kegiatan, yaitu :
  - 6.1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
  - 6.2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - 6.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - 6.4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - 6.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
  - 6.6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - 6.7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - 6.8. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
  - 6.9. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6.10 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6.11 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah;
  - 6.12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD;
  - 6.13 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK);

- 6.14 Fasilitas Penyaluran Bantuan Keuangan dan Sosial;
- 6.15 Kodifikasi dan Standarisasi Nomenklatur Penganggaran;
- 6.16 Pemutakhiran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6.17 Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Reklame;
- 7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota :
  - 7.1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota.

Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2009 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2009 ini.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Daerah dan Sistem Pemungutan sebagai media pengawasan pendapatan daerah. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD;  
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan menetapkan target pendapatan daerah untuk perencanaan target pada tahun berikutnya.
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;  
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana transportasi bagi pelaksanaan kegiatan operasional DPPKAD.
3. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pelatihan pengoperasian SIPKD serta Sistem Informasi jaringan
4. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kota.  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan aparatur dalam menyusun verifikasi DPA, DPPA dan RKA ditiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku pengembal amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2009.

### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

***Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.***

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- **Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)**
- **Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)**

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- **80 – 100 = Baik**
- **50 - 79 = Cukup**
- **< 50 = Kurang**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### ➤ **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

#### ➤ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

#### ➤ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Secara umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sukabumi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013. Yaitu “***Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik***” yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki indikator sasaran sebanyak **10 (sepuluh)** indikator sasaran. Uraian lebih lanjut dapat **dijelaskan sebagai berikut :**

**Tabel 3.1**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran 1**

Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang seimbang dan terkelolanya Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan Publik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Capaian Kinerja thn 2008 (%)	Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Raperda APBD tepat waktu	Raperda	2	-	-	2	2	100
2	Perda APBD tepat waktu	Perda	2	-	-	2	2	100
3	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	%	51,19	-	-	54	51,7	96
4	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah	%	47,81	-	-	46	48,3	105
5	Rasio efisiensi belanja	%	<100	-	-	<100	Menunggu Audit BPK	-
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WDP	-	-	WDP	Menunggu Audit BPK	-

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 6 (enam) buah indikator sasaran yang ditetapkan hanya 2 (dua) indikator yang tidak mencapai sasaran yaitu Rasio Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah dan Rasio Belanja tidak langsung terhadap total belanja Daerah.

***Pada dasarnya, rasio belanja langsung setiap tahunnya harus semakin meningkat mengingat dana yang ada dalam Pos belanja langsung berhubungan secara langsung dengan hajat hidup masyarakat Kota Sukabumi yang setiap tahunnya semakin meningkat. Jadi dengan demikian adalah hal yang dapat dimaklumi apabila rasio Belanja Langsung terhadap total belanja***

*daerah akan terus meningkat. Pada Tahun 2009 ini, Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja Daerah tidak mencapai target yang diharapkan karena Belanja Hibah dari Provinsi yang menyentuh hajat hidup Masyarakat Kota Sukabumi yang seharusnya masuk kedalam Pos Belanja Langsung tapi dalam pelaksanaannya masuk kedalam Pos Belanja Tidak Langsung. Hal ini pula yang menyebabkan Rasio Belanja Tidak Langsung melebihi dari yang ditargetkan dalam Tahun Anggaran 2009.*

**Tabel 3.1**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran 2**  
 Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Capaian Kinerja thn 2008 (%)	Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya PAD	Rp. Juta	52.871	62.4141	119,91	53.320	63.1	118,34
2	Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian sasaran berada diatas angka 100% (118,34%) atau pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2009 bermakna baik. Tercapainya target tersebut dikarenakan ada pemasukan yang berasal dari tunggakan pajak dan retribusi daerah serta denda atas tunggakan berdasarkan SKPD/SKRD yang telah diterbitkan.

**Tabel 3.1****Evaluasi Pencapaian Sasaran 3**

Meningkatnya Wawasan dan Keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2008		Capaian Kinerja thn 2008 (%)	Tahun 2009		Capaian Kinerja thn 2009 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	Orang	30	-	-	40	75	100
2	Persentasi Pegawai yang memiliki Kualifikasi S1 Akutansi	%	5	-	-	6	6	100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek dan Persentase Pegawai yang memiliki Kualifikasi S1 Akutansi dapat mencapai sasaran kinerja 100%, hal tersebut dapat dikategorikan sesuai harapan.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pendapatan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kondisi Anggaran Pendapatan Daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan sebelum perubahan, mengalami kenaikan yaitu sebesar **Rp. 51.917.023.000,00** dimana anggaran pendapatan sebelum perubahan direncanakan sebesar **Rp. 458.908.401.000,00** menjadi **Rp. 510.825.424.000,00** atau **11,31 %**.

#### 3.3.1. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Kondisi ekonomi global yang belum pulih dari krisis keuangan Tahun 2008, masih belum dapat meningkatkan perekonomian nasional dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2008 yang menurun, mengindikasikan masih tergantungnya perekonomian Kota Sukabumi dengan kondisi makro perekonomian nasional yang berakibat pada lemahnya peningkatan pendapatan daerah.

### 3.3.2. Estimasi Pendapatan Daerah

Untuk memperkirakan pendapatan daerah Kota Sukabumi dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ada 2 (dua) metode yang dilakukan yaitu :

1. Metode penelitian potensi, baik yang sifatnya intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga dapat memberi hasil tepat tentang kondisi potensi yang ada.
2. Metode realisasi empiris riil di lapangan sehingga perkiraan untuk Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar **Rp. 510.825.424.000,00** dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar **Rp. 458.908.401.000,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 51.917.023.000,00** atau **11,31 %**.

### 3.3.3. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 yaitu:

1. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan komunikasi yang intensif dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
4. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

### 3.3.4. Kondisi Umum Belanja Daerah

Secara obyektif masih banyak masalah dan tantangan yang harus di selesaikan dan menjadi prioritas dalam Tahun 2009 tetapi dilain pihak kondisi dan kemampuan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran masih terbatas, sehingga

prinsip *efisiensi, efektifitas, equity* dan *ekonomis* tetap menjadi dasar dalam pengalokasian belanja daerah tentunya dengan memperhatikan tolok ukur dan target kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan definisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, maka alokasi anggaran lebih diarahkan pada Belanja Langsung sehingga rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung daerah mencapai 48,35% dan 51,65%. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelompokan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan PP 41 tahun 2007 sebagai berikut :

1. **Urusan Wajib** meliputi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD. R. Syamsudin, S.H., Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Alam, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat, Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat KPU, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor PDE, Arsip dan Humas, Kantor Perpustakaan Umum Daerah
2. **Urusan Pilihan** meliputi : Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan Perindustrian.

### 3.3.5. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam belanja daerah adalah :

1. Standar biaya yang dipakai dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 belum sepenuhnya menyesuaikan dengan eskalasi harga.
2. Mengingat keterbatasan anggaran, maka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 belum mampu untuk membiayai secara menyeluruh kegiatan yang diinginkan.
3. Masih adanya program pemerintah propinsi/pusat yang harus dilaksanakan pada perjalanan tahun anggaran, sehingga akan menyulitkan dalam pengeluaran belanja daerah karena kegiatan tersebut tidak masuk pada penyusunan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **3.3.6. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan umum belanja daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 tetap berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin kegiatan kegiatan strategis tetap bisa dilaksanakan dengan cara penyesuaian akibat dari penurunan Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas, efisiensi penggunaan anggaran. Upaya yang dilakukan secara umum adalah :

1. Pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisiensi dan efektif.
2. Penggunaan anggaran belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan riil pembangunan.

#### **3.4. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Kegiatan**

Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pada tahun Anggaran 2009 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi melaksanakan 44 kegiatan (terlampir) dengan pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikategorikan bahwa Program Kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan semua kegiatan baik yang menyangkut pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, demikian pula dari hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan keberhasilan dengan kriteria Sesuai Harapan sebanyak 26 kegiatan, kriteria Efisien dan Sesuai Harapan sebanyak 18 kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2009 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Sukabumi dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah :

- a. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara :
  - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
  - 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada melalui :
    - a) Penggalan potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
    - b) Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
  - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;

d. melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan ini disampaikan banyak terima kasih.

Sukabumi, Januari 2010  
**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGANDAN ASET DAERAH  
KOTA SUKABUMI**

**Drs. H. KOSTAMAN, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19590416 198503 1 004**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Jo. Keputusan Walikota Nomor 37 Tahun 2004, memiliki 2 (dua) tugas penting yang bersifat integral di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu : Menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, dengan asumsi bahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secara Struktural sebagai perangkat daerah dituntut pula untuk menunjang pencapaian Visi Kota Sukabumi “Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Takwa“ yang secara proporsional ditetapkan dalam APBD Kota Sukabumi pada setiap tahunnya. Pencapaian Visi Kota Sukabumi ini diwujudkan secara bertahap melalui Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008 – 2013 yaitu “Dengan Iman dan Takwa mewujudkan Pemerintahan yang amanah berparadigma surgawi menuju Kota Sukabumi yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera (dilandasi nilai Filosofis Shidiq, Amanah, Fatonah, Tabligh)”.

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi sebagaimana dijelaskan dalam Renstra adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 Misi, 3 Tujuan, 3 Sasaran yang selanjutnya dituangkan ke dalam 6 Kebijakan dan 10 Program.

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi, maka sebagai acuan utama yang harus dipegang oleh para pemeran organisasi adalah rumusan yang menjadi tujuan dan sasaran selama tahun 2009 yang pada dasarnya juga merupakan bagian Rencana Strategis tahun 2008 – 2013, yaitu :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Suatu Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD yang Akuntabel dan Profesional.	a. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas penggunaan Anggaran yang seimbang dan terkelolanya Aset daerah yang berorientasi pada Kepentingan Publik
2. Peningkatan Pendapatan Daerah yang Sinergitas dan Realistis.	b. Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah.
3. Terwujudnya Aparatur Pengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki Wawasan dan Keterampilan	c. Meningkatnya Wawasan dan Keterampilan dalam Pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2009 dari 3 misi, 3 tujuan, 3 sasaran dan 6 Kebijakan tersebut dalam proses perjalanannya dapat dilaksanakan 7 Program dengan 10 (sepuluh) Indikator sasaran dan 46 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal dengan melakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap 3 sasaran dengan 10 indikator sasaran yaitu :

1. Raperda APBD tepat waktu.
2. Perda APBD tepat waktu.
3. Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah.
4. Persentase Belanja tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah.
5. Persentase Efisiensi Belanja.
6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.
7. Meningkatnya PAD.
8. Besarnya pinjaman yang tertlealisasi terhadap rencana pinjaman.
9. Jumlah Pegawai yang mengikuti BINTEK.
10. Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi S1 Akutansi.

Maka untuk Rencana Tingkat Capaian, Realisasi Persentase Rencana Tingkat Capaian, dapat kami gambarkan sebagai berikut :

## 1.1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	%
- Masukan : Tersedianya Dana	Rp140.000.000,00	Rp135.848.500,00	97,03%
- Keluaran : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah	2	2	100%
- Hasil yang dicapai : Pendapatan daerah dapat meningkat dengan optimal	90%	90%	90%

Kegiatan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah sudah dilaksanakan dengan menyerap dana 97, 03%, dengan realisasi 100% dalam tahap pembuatan Raperda. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan.

## 1.2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	%
- Masukan : Tersedianya Dana	Rp 155.140.000,00	Rp 152.443.500,00	98,26%
- Keluaran : 1. Terbitnya Buku Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2009 2. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2010	2	2	100%
- Hasil yang dicapai : Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan	90%	90%	90%

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang diharapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sukabumi per tahun anggaran.

### 1.3. Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	% Capaian
Persentase Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah	54	51,7	96%

Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah tidak mencapai target yang diharapkan, karena belanja hibah dari Provinsi masuk kedalam pos belanja tidak langsung.

### 1.4. Persentase Belanja Tidak Lansung terhadap Belanja Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	% Capaian
Persentase Belanja tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah	46	48,3	105%

Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah melebihi target, karena ada penambahan pos belanja hibah dari provinsi.

### 1.5. Persentase Efisiensi Belanja

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	% Capaian
Persentase Efisiensi belanja	<100	-	menunggu Audit BPK

Persentase efisiensi belanja belum dapat dikatagorikan, karena menunggu audit BPK

### 1.6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Indikator ini diharapkan tingkat capaiannya adalah WDP, namun demikian untuk mencapai target tersebut harus menunggu audit BPK.

## 1.7. Meningkatnya PAD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya PAD	53,32	63,1	118,34

Pelaksanaan pencapaian target PAD pada tahun 2009 dapat dikategorikan melebihi target, hal ini disebabkan adanya pendapatan dari tunggakan pajak dan retribusi daerah serta denda atas tunggakan berdasarkan SKPD/SKRD yang telah diterbitkan.

## 1.8. Besaran Pinjaman Yang Terealisasi Terhadap Rencana Pinjaman

Pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2009 DPPKAD tidak melaksanakan transaksi pinjaman, oleh karena itu tidak ada persentase capaian.

## 1.9. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti BINTEK

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	%
- Masukan : Tersedianya Dana	Rp 145.390.000,00	Rp 140.501.000,00	96,64%
- Keluaran : Terlaksananya BinteK Implementasi Paket Regulasi Pemerintah atau Pemerintah daerah tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang diikuti oleh 75 Orang	1 Paket	1 Paket	100%
- Hasil yang dicapai : Penatausahaan keuangan daerah di tiap SKPD dapat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%	90%	90%

Kegiatan BinteK ini menyerap dana 96,643%, dengan jumlah peserta 75 orang dengan realisasi 100%. Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efisien dan sesuai harapan

## 1.10. Persentase Pegawai yang memiliki kualifikasi S1 Akutansi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku			
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	% Capaian
Persentase pegawai yang memiliki kualifikasi S1 Akutansi	6	6	100

Pengadaan pegawai yang mempunyai kualifikasi S1 Akutansi pada DPPKAD untuk tahun anggaran 2009 dapat mencapai target dengan capaian 100%, maka kegiatan ini dapat dikategorikan dapat mencapai target yaitu sesuai harapan.

Dengan demikian pencapaian 10 (sepuluh) indikator sasaran yang telah ditetapkan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013. Yaitu “Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik” yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dapat dilaksanakan dengan kategori efisien dan sesuai harapan, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa permasalahan/hambatan yang dijumpai antara lain :

- a. Dalam aktifitas ekstensifikasi belum dapat dilaksanakan diversifikasi dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, karena kondisi masyarakat pada umumnya belum bisa menerima terjadinya peningkatan aktivitas pada suatu kegiatan yang dapat secara langsung berdampak kepada peningkatan pajak atau retribusi daerah.
- b. Belum terpenuhinya kegiatan yang khusus untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara lainnya.
- c. Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kota Sukabumi.

**MATRIK RENCANA STRATEGIK**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**2008 - 2013**

VISI	MISI	TUJUAN MISI	SASARAN MISI				EKSISTING (2007)	TARGET YANG INGIN DICAPAI						STRATEGI PENCAPAIAN					
			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2008	2009	2010	2011	2012	2013	KEBIJAKAN	PROGRAM	BIDANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	1. Raperda APBD tepat waktu	Cukup Jelas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007	Raperda	2	2	2	2	2	2	1. Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	<b>I. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Bidang Penagihan dan Penyuluhan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pendaftaran dan Pendataan				
				2. Perda APBD tepat waktu	Cukup jelas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007	Perda	2	2	2	2	2	2							
				3. Persentase Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	Total Belanja Langsung dibagi dengan Total Belanja Daerah X 100%	%	52,90	52,19	54	54,2	54,4	54,6				54,8	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	<b>II. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Sekretariat, Bidang Perbendaharaan
																		<b>III. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS</b>	Bidang Perbendaharaan
				4. Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi dengan Total Belanja Daerah X 100%	%	47,10	47,81	46	45,8	46,6	46,4				45,2:100	3. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana sebagai Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>IV. PROGRAM PENATAAN SISTEM DOKUMEN</b>	Sekretariat
																		<b>V. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR</b>	Bidang Aset, Sekretariat
				5. Persentase Efisiensi Belanja	Realisasi Belanja dibagi dengan Anggaran Belanja X 100%	%	< 100	<100	<100	<100	<100	<100				<100	4. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan SKPD yang Transparan dan Akuntabel yang tersaji dalam suatu Proses Manajemen sebagai penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>VI. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA</b>	Sekretariat
6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Cukup Jelas	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP										
Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan	Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan	Optimalisasi Pendapatan dengan Intensifikasi dan Realisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya PAD	Jumlah Peningkatan PAD dibagi dengan PAD tahun lalu X 100%	Rp. Juta	44019	52871	53320	54455	55615	56800	58010	5. Sistem Pengelolaan Pendapatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memperhatikan	<b>VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	Bidang Penagihan dan Penyuluhan, Bidang Aset, Bidang Pendaftaran dan Pendataan			

1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15
				2. Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	Jumlah Pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah Pinjaman yang sudah disetujui X 100%	%	-	-	-	-	-	-	-	perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro	<b>VIII. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Bidang Anggaran
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan	Meningkatnya Wawasan dan Keterampilan dalam pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku	1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	Cukup Jelas	Orang	20	30	40	50	60	70	80	6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward and punishment terhadap prestasi kerja yang terukur	<b>IX. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Sekretariat (Sub Bag. Umum Program)
				2. Persentase Pegawai yang memiliki Kualifikasi S1 Akuntansi	Jumlah Pegawai yang berijazah S1 Akuntansi dibagi Jumlah Pegawai X 100%	%	5%	5%	6%	7%	8%	9%	10%		<b>X. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>	Sekretariat

TABEL A.1

**Rencana Kinerja Tahunan  
Tahun 2009**

**Instansi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Sasaran				Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	1.Raperda APBD tepat waktu	Raperda		<b>1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah & retribusi	Masukan : Tersedianya Dana  Keluaran : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah  Hasil : Pendapatan daerah dapat meningkat dengan optimal	Rp	140.000.000	
	2.Perda APBD tepat waktu	Perda			2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Masukan : Tersedianya Dana  Keluaran : Terbitnya Buku Peraturan Daerah tentang : 1. PERDA tentang APBD T.A. 2009 2. RAPERDA tentang APBD T.A. 2010 3. Nota Keuangan APBD T.A. 2009 4. Nota Keuangan RAPBD T.A. 2010 5. Sambutan Walikota pada Rapat Paripurna Penetapan RAPBD T.A. 2010  Hasil : Dinas/Unit Kerja dapat melaksanakan Program Kerjanya sesuai dengan Perda APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan	Rp	174.185.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>1. Terbitnya Buku Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2009</p> <p>2. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2010</p> <p>Hasil :</p> <p>Dinas/Unit kerja dapat melaksanakan Program kerjanya sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan</p>	Rp	127.606.000	
					4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>1. Terbitnya buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2009</p> <p>2. Buku Nota Keuangan Perubahan APBD Thn Anggaran 2009</p> <p>3. Sambutan Walikota pada Rapat Paripurna Penetapan R-APBD T.A. 2010</p> <p>Hasil :</p> <p>Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan</p>	Rp	154.190.000	
					5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terbitnya Buku Peraturan Walikota tentang Penjabaran perubahan APBD 2009</p>	Rp	130.665.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Hasil :</p> <p>Dinas/unit kerja dapat melaksanakan program kerjanya sesuai dengan Perwal tentang penjabaran APBD serta memungkinkan pengendalian anggaran per program/kegiatan</p>			
					6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Masukan :</p> <p>1. Terbitnya buku Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2008</p> <p>2. Laporan Semesteran pertama dan prognosisi pemda untuk enam bulan berikutnya</p> <p>Hasil :</p> <p>Penggunaan anggaran daerah yang terukur dan terpantaunya pelaporan keuangan pemerintah daerah</p>	Rp	142.778.000	
					7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terbitnya buku Peraturan Walikota tentang Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008</p> <p>Hasil :</p> <p>Penggunaan anggaran daerah tahun 2008 dapat dipertanggungjawabkan</p>	Rp	106.572.000	
					8. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terpenuhinya dan terlaksananya pelatihan pengoperasian SIPKD, serta Sistem Informasi Jaringan Keuangan yang terintegrasi</p>	Rp	188.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					9. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Hasil : Aparat yang terampil dalam mengoperasikan SIPKD sehingga Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat waktu</p> <p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi Pemerintah (U.U, Perpres, Permen) dan atau Pemerintah Daerah (Perda/Perkada) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Aparat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>Hasil : Penatausahaan keuangan daerah di tiap SKPD dapat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	Rp	70.000.000	
					10. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Bintek Implementasi Paket Regulasi Pemerintah atau Pemerintah daerah tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang diikuti oleh 75 Orang</p> <p>Hasil : Penatausahaan keuangan daerah di tiap SKPD dapat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	Rp	85.000.000	
					11. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	<p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : 1. Terlaksananya sosialisasi Manajemen aset daerah 2. Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) 3. Terkumpulnya data inventaris barang daerah di 32 OPD</p>	Rp	154.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber PAD	<p>Hasil :</p> <p>Peningkatan pengelolaan inventarisasi aset yang mendorong terkontrolnya kondisi akhir aset daerah</p> <p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi melalui operasi sisir PAD, SPPT dan Penyuluhan PBB</p> <p>Hasil :</p> <p>Peningkatan pendapatan daerah dari sektor bagi hasil pajak</p>	Rp	337.888.000	
					13. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK)	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Panggung Reklame sebagai sarana pemasangan reklame kain</p> <p>Hasil :</p> <p>Penyelenggaraan reklame kain dapat terawasi serta meningkatkan ketertiban dan keindahan kota</p>	Rp	36.500.000	
					14. Fasilitas Penyaluran Bantuan Keuangan dan Sosial	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terselenggaranya fasilitas Penyaluran belanja hibah, bantuan-bantuan sosial, bagi hasil, serta belanja tidak terduga (BTT) ke masyarakat selama satu tahun</p> <p>Hasil :</p> <p>Peningkatan kesejahteraan masyarakat kota sukabumi</p>	Rp	174.000.000	
					15. Kodivikasi dan Standarisasi Nomenklatur Penganggaran	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p>	Rp	52.465.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					16. Pemutakhiran Data Base Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p>Keluaran :</p> <p>Tersusunnya buku Kodivikasi dan Standarisasi nomenklatur penganggaran</p> <p>Hasil :</p> <p>Penyusunan anggaran yang lebih terarah dan teratur</p> <p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Tersusunnya Data Base Wajib Pajak Reklame dan Wajib Retribusi sewa tanah</p> <p>Hasil :</p> <p>Terpeliharanya sistem SIMPATDA, tertib administrasi NPWP dan buku pedoman tentang pola tarif pajak &amp; retribusi daerah</p>	Rp	93.765.000	
					17. Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Reklame	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terlaksananya proses pengelolaan perijinan Reklame dan terlaksananya pengawasan terhadap objek Pajak Reklame dalam satu tahun anggaran</p> <p>Hasil :</p> <p>Pemasangan reklame yang tertib dan terkoordinasi</p>	Rp	60.732.000	
	3. Persentase belanja langsung terhadap total belanja daerah	%		<b>2. Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terpenuhinya Photocopy, Laporan- laporan kegiatan dinas dan penyampaian surat - surat dinas/penting lainnya.</p> <p>Hasil :</p> <p>Kelancaran Komunikasi antar instansi lewat surat menyurat dan arsip dinas.</p>	Rp	8.230.000	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p>	Rp	897.196.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Keluaran :</p> <p>Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik, dan langganan listrik PJU</p> <p>Hasil :</p> <p>Memudahkan Koordinasi &amp; Komunikasi dgn instansi lain, beroperasinya alat-alat elektronik pendukung kinerja dan terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih</p>			
					3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terpenuhinya tugas-tugas dan kegiatan perkantoran selama 1 tahun berjalan</p> <p>Hasil :</p> <p>Peningkatan efisiensi waktu dan efektifitas kerja</p>	Rp	27.600.000	
					4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terpenuhinya fasilitas Administrasi Keuangan dan Pembayaran Honorarium bulanan dan Tunjangan lainnya kpd non PNS</p> <p>Hasil :</p> <p>Tersalurkannya dana kesejahteraan kepada non PNS</p>	Rp	91.210.000	
					5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sehingga kebersihan ruang kantor dapat terjaga</p> <p>Hasil :</p> <p>Kenyamanan dan Keindahan ruang kantor</p>	Rp	27.572.000	
					6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p>	Rp	129.428.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	<p>Keluaran : Terpenuhinya fasilitas perbaikan alat-alat kerja di DPPKAD meliputi mesin tik, mesin forporasi, printer kerja, komputer PC, dan komputer jaringan SIMPATDA</p> <p>Hasil : Terpeliharanya alat-alat kerja dalam kondisi layak pakai</p> <p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan alat-alat tulis kantor yang memadai</p> <p>Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat</p>	Rp	89.326.000	
					8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan berupa :</p> <p>a. Cetakan Umum Keperluan Kantor</p> <p>b. Cetakan Administrasi Pengelolaan keuangan</p> <p>Hasil : Terlaksananya urusan administrasi dan Pengelolaan Keuangan yang lebih tertib dan teratur</p>	Rp	1.062.805.000	
					9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	<p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terpenuhinya alat-alat penerangan bangunan kantor yang memadai</p> <p>Hasil : Terciptanya suasana kantor yang nyaman</p>	Rp	19.727.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<p>dan mendukung kelancaran kerja</p> <p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terpenuhinya bahan bacaan bagi DPPKAD</p> <p>Hasil : Meningkatkan Pengetahuan dan wawasan aparat terhadap implementasi peraturan perundang-undangan</p>	Rp	10.368.000	
					11. Penyediaan Makanan dan Minuman	<p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terpenuhinya jamuan makan dan minum harian pegawai dan untuk jamuan rapat</p> <p>Hasil : Menciptakan suasana kekeluargaan dalam rapat-rapat intern DPPKAD</p>	Rp	57.700.000	
					12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	<p>Masukan : Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi &amp; konsultasi kedinasan baik dalam daerah maupun luar daerah</p> <p>Hasil : Terbentuknya persamaan persepsi terhadap regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari Provinsi maupun Pusat</p>	Rp	190.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Persentase belanja langsung terhadap total belanja daerah	%		<b>3. Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS</b>	1. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terpenuhinya fasilitas pelayanan Purna bhakti bagi pegawai yang akan pensiun Hasil : Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang akan memasuki masa pensiun	Rp	584.456.000	
					2. Pemandahan Tugas PNS	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terpenuhinya fasilitas pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan yang memadai Hasil : Terakomodirnya administrasi perpindahan tugas pegawai	Rp	22.638.000	
	4. Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah	%		<b>4. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>	1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terpenuhinya sarana mobilitas di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Hasil : Meningkatkan kelancaran transportasi dan mobilitas aparat dalam menjangkau daerah atau lokasi kunjungan kerja	Rp	1.516.700.000	
					2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa komputer dan printer di lingkungan DPPKAD Kota Sukabumi Hasil : Kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan aktivitas perkantoran.	Rp	455.962.000	
					4. Pengadaan Tanah	Masukan :	Rp	1.135.942.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>1.Terpenuhinya Perluasan tanah untuk pembangunan SMKN 4</p> <p>2.Terpenuhinya tanah untuk pembangunan SDN Rancakadu Kelurahan Sindang Palay</p> <p>3.Terpenuhinya tanah untuk perluasan lapang publik kecamatan cibeureum</p> <p>Hasil :</p> <p>Kelancaran pembangunan sarana publik yang bermanfaat bagi masyarakat</p>			
					5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terawat dan tertatanya Gedung Kantor DPPKAD</p> <p>Hasil :</p> <p>Terciptanya kondisi gedung yang terpelihara dan layak pakai</p>	Rp	59.000.000	
					6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terpenuhinya fasilitas pemeliharaan, perawatan, perbaikan kendaraan dinas operasional DPPKAD</p> <p>Hasil :</p> <p>Kendaraan operasional yang laik jalan untuk perjalanan dinas</p>	Rp	155.122.000	
					7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terawatnya Mebeler DPPKAD</p> <p>Hasil :</p> <p>Kenyamanan dan keindahan ruang kantor dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas</p>	Rp	33.050.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Efisiensi Belanja	%		<b>5. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Laporan Capaian Kinerja berupa : - LAKIP Dinas = 5 buku - Renja Dinas = 5 buku - Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas = 5 buku Hasil :  Kemudahan dalam evaluasi kinerja dan evaluasi pencapaian program SKPD dalam 1 tahun	Rp	21.500.000	
					2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran :  Terpenuhinya laporan keuangan Semesteran dan laporan SPT tahunan (tahun 2008) Hasil : Posisi keuangan dan jumlah Wajib Pajak dapat terpantau	Rp	10.975.000	
					3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran :  Terpenuhinya laporan prognosis dan realisasi anggaran dinas Hasil : Akurasi Perencanaan Anggaran yang terukur	Rp	20.000.000	
					4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran :  Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun Hasil : Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan DPPKAD dapat di evaluasi	Rp	9.420.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah	Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	%		<b>6. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kota</b>	1. Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>1.Terselenggaranya asistensi/tugas pembantuan terhadap verifikasi DPA-SKPD T.A. 2009 sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>2.Terselenggaranya asistensi/tugas pembantuan terhadap penelaahan/ verifikasi RKA/DPPA-SKPD T.A. 2009 sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>3.Terselenggaranya asistensi/tugas pembantuan terhadap verifikasi DPPA-SKPD T.A. 2009 sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>4.Terselenggaranya asistensi/tugas pembantuan terhadap penelaahan RKA-SKPD T.A. 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Hasil :</p> <p>Aparatur yang handal dalam menyusun verifikasi DPA, DPPA dan RKA di tiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	Rp	200.851.000	
Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pegawai yang memiliki Kualifikasi S1 Akuntansi	%		<b>7. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	1. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	<p>Masukan :</p> <p>Tersedianya Dana</p> <p>Keluaran :</p> <p>Terpenuhinya penyelenggaraan dan pengiriman pegawai yang akan mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Hasil :</p> <p>Terbentuknya wawasan dan pengetahuan pegawai terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah</p>	Rp	75.000.000	

**Pengukuran Pencapaian Sasaran  
Tahun 2009**

**Instansi : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
1 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	1. Raperda APBD tepat waktu	2	2	100%		
	2. Perda APBD tepat waktu	2	2	100%		
	3. Persentase Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah	54	51,7	96		
	4. Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah	46	48,3	105%		
	5. Persentase Efisiensi Belanja	<100	-	-		Menunggu Audit BPK
	6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	-	-		Menunggu Audit BPK
2 Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya PAD	53.320	63.1	118,34		
	2. Besaran Pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	-	-			
3 Meningkatkan Wawasan dan Keterampilan dalam pelaksanaan Tupoksi sesuai tuntutan Peraturan Perundangan yang berlaku	1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	40	75	100%		
	2. Persentase Pegawai yang memiliki Kualifikasi S1 Akuntansi	6%	6%	100%		

## LAMPIRAN 5

## ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA KEGIATAN TAHUN 2009

Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Kegiatan	Input		Output		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan Rumus (%)	% Efisiensi	OUTCOME		Efektifitas		% Efektifitas	Keterangan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Jasa Surat-menyerurat	21.770.000,00	21.770.000,00	12 bulan	12 bulan	Rp 1.814.166,67	Rp 1.814.166,67	100%	-	100%	100%	0,12	0,12	100%	sesuai Harapan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.194.080.000,00	1.194.070.604,00	12 bulan	12 bulan	Rp 99.506.666,67	Rp 99.505.883,67	100%	-	100%	100%	0,12	0,12	100%	sesuai Harapan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	121.362.000,00	121.362.000,00	94 kali sewa gedung dan 24 kali sewa mobil	94 kali sewa gedung dan 24 kali sewa mobil	Rp 1.028.491,53	Rp 1.028.491,53	100%	-	100%	100%	1,18	1,18	100%	sesuai Harapan
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	48.570.000,00	49.120.000,00	8 orang	8 orang	Rp 6.071.250,00	Rp 6.140.000,00	100%	-	100%	100%	0,08	0,08	100%	sesuai Harapan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.572.000,00	42.572.000,00	31 jenis	31 jenis	Rp 1.373.290,32	Rp 1.373.290,32	100%	-	100%	100%	0,31	0,31	100%	sesuai Harapan
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor	204.000.000,00	204.000.000,00	34 unit	34 unit	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	100%	-	100%	100%	0,34	0,34	100%	sesuai Harapan
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.090.000,00	100.090.000,00	64 Jenis	64 jenis	Rp 1.563.906,25	Rp 1.563.906,25	100%	-	100%	100%	0,64	0,64	100%	sesuai Harapan
8	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	1.567.255.000,00	1.567.172.500,00	64 jenis	64 jenis	Rp 24.488.359,38	Rp 24.487.070,31	99,99%	0,10%	100%	100%	0,64	0,64	100%	ef dan ev
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	30.203.000,00	30.203.000,00	27 jenis	27 jenis	Rp 1.118.629,63	Rp 1.118.629,63	100%	-	100%	100%	0,27	0,27	100%	sesuai Harapan
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.368.000,00	10.368.000,00	2952 eksemplar	2952 eksemplar	Rp 3.512,20	Rp 3.512,20	100%	-	100%	100%	29,52	29,52	100%	sesuai Harapan
11	Penyediaan bahan Logistik Kantor	20.425.000,00	20.000.000,00	100 buah	100 buah	Rp 204.250,00	Rp 200.000,00	97,92%	-	100%	100%	1	1	100%	sesuai Harapan
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	74.970.000,00	74.970.000,00	7296 dus	7296 dus	Rp 10.275,49	Rp 10.275,49	100%	-	100%	100%	72,96	72,96	100%	sesuai Harapan
13	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	288.020.000,00	288.020.000,00	1463 HOK	1463 HOK	Rp 196.869,45	Rp 196.869,45	100%	-	100%	100%	14,63	14,63	100%	sesuai Harapan

14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.258.050.000,00	1.475.009.450,00	1 Unit Sedan, 1 Unit SUV, 8 Unit MPV, 2 Unit Motor Roda 2	1 Unit Sedan, 1 Unit SUV, 8 Unit MPV, 2 Unit Motor Roda 2	Rp 188.170.833,33	Rp 122.917.454,17	65,32%	34,69%	100%	100%	0,12	0,12	100%	ef dan ev
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung / Kantor	503.962.000,00	498.397.000,00	48 Unit PC Deskbook, 10 Unit Laptop, 45 Unit Printer tinta, 2 Unit Printer Dot Matrik, 3 Unit Desk Book, 13 Unit PC Desktop P4	48 Unit PC Deskbook, 10 Unit Laptop, 45 Unit Printer tinta, 2 Unit Printer Dot Matrik, 3 Unit Desk Book, 13 Unit PC Desktop P4	Rp 4.164.975,21	Rp 4.118.983,47	98,90%	1,10%	100%	100%	1,21	1,21	100%	ef dan ev
16	Pengadaan Tanah	2.114.913.000,00	2.105.099.500,00	13483 m2	12183 m2	Rp 156.857,75	Rp 172.789,91	100%	-	13483 m2	12183 m2	134,83	121,83	100%	sesuai Harapan
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	99.120.000,00	99.120.000,00	257 m dinding dan 10 buah pintu	257 m dinding dan 10 buah pintu	Rp 371.235,96	Rp 371.235,96	100%	-	100%	100%	2,67	2,67	100%	sesuai Harapan
18	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	197.456.000,00	197.451.000,00	6 unit mobil dan 25 unit motor	6 unit mobil dan 25 unit motor	Rp 6.369.548,39	Rp 6.369.387,10	100%	-	6 unit mobil dan 25 unit motor	6 unit mobil dan 25 unit motor	0,31	0,31	100%	sesuai Harapan
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	49.575.000,00	49.575.000,00	220 unit	220 unit	Rp 225.340,91	Rp 225.340,91	100%	-	100%	100%	2,2	2,2	100%	sesuai Harapan
20	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	751.721.000,00	751.720.200,00	90 orang	90 orang	Rp 8.352.455,56	Rp 8.352.446,67	100%	-	100%	100%	0,9	0,9	100%	sesuai Harapan
21	Pemindahan Tugas PNS	22.638.000,00	22.638.000,00	5000 orang	5000 orang	Rp 4.527,60	Rp 4.527,60	100%	-	100%	100%	50	50	100%	sesuai Harapan
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	100%	-	100%	100%	0,04	0,04	100%	sesuai Harapan
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.500.000,00	21.500.000,00	3 laporan	3 laporan	Rp 7.166.666,67	Rp 7.166.666,67	100%	-	100%	100%	0,03	0,03	100%	sesuai Harapan
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10.975.000,00	10.975.000,00	4 Laporan	4 Laporan	Rp 2.743.750,00	Rp 2.743.750,00	100%	-	100%	100%	0,04	0,04	100%	sesuai Harapan
25	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	20.000.000,00	10 buku	10 buku	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	100%	-	10 buku	10 buku	0,1	0,1	100%	sesuai Harapan
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.420.000,00	9.420.000,00	1 Laporan keuangan DPPKAD	1 Laporan keuangan DPPKAD	Rp 9.420.000,00	Rp 9.420.000,00	100%	-	100%	100%	0,01	0,01	100%	sesuai Harapan
27	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	140.000.000,00	135.848.500,00	2	2	Rp 70.000.000,00	Rp 67.924.250,00	97,03%	2,07%	2	2	0,02	0,02	100%	ef dan ev

28	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APB	214.998.000,00	197.090.000,00	5	5	Rp 42.999.600,00	Rp 39.418.000,00	91,67%	8,33%	5	5	0,05	0,05	100%	ef dan ev
29	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	155.140.000,00	152.443.500,00	2	2	Rp 77.570.000,00	Rp 76.221.750,00	98,26%	1,74%	2	2	0,02	0,02	100%	ef dan ev
30	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	154.190.000,00	149.061.000,00	3	3	Rp 51.396.666,67	Rp 49.687.000,00	96,67%	3,33%	3	3	0,03	0,03	100%	ef dan ev
31	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahn APBD	130.665.000,00	128.655.000,00	1	1	Rp 130.665.000,00	128.655.000,00	98,46%	1,54%	1	1	0,01	0,01	100%	ef dan ev
32	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	142.778.000,00	137.412.500,00	1 Paket	1 Paket	Rp 142.778.000,00	137.412.500,00	96,24%	3,76%	100%	100%	0,01	0,01	100%	ef dan ev
33	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pejabaran APBD dan Peranggung Jawaban Pelaksanaan APBD	106.572.000,00	103.016.000,00	1 Paket	1 Paket	Rp 106.572.000,00	103.016.000,00	96,66%	3,34%	100%	100%	0,01	0,01	100%	ef dan ev
34	Penyusunan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD	221.176.000,00	219.735.200,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 221.176.000,00	219.735.200,00	99,35%	0,64%	100%	100%	0,01	0,01	100%	ef dan ev
35	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	84.116.000,00	84.116.000,00	80 Orang	80 Orang	Rp 1.051.450,00	Rp 1.051.450,00	100%	-	80 Orang	80 Orang	0,8	0,8	100%	
36	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengeloan Keuangan Daerah	145.390.000,00	140.501.000,00	1 Paket	1 Paket	Rp 145.390.000,00	140.501.000,00	96,64%	3,36%	100%	100%	0,01	0,01	100%	ef dan ev
37	Peningkatan Mananajemen Aset/Barang Daerah	154.000.000,00	149.787.000,00	300 Orang 1paket program 100 Buku Inventaris	300 orang 1 Paket Program 10 Buku Inventaris	Rp 38.490,38	Rp 481.630,23	97,26%	2,74%	300 Orang 1paket program 100 Buku Inventaris	300 orang 1 Paket Program 10 Buku Inventaris	3,1	3,1	100%	ef dan ev

38	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	337.888.000,00	324.895.000,00	12 Bulan	12 Bulan	Rp 28.157.333,33	Rp 27.074.583,33	96,15%	3,85%	12 Bulan	12 Bulan	0,12	0,12	100%	ef dan ev
39	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Reklame SIMREK	36.500.000,00	34.593.000,00	Panggung Reklame 2 (dua) unit	Panggung Reklame 2 (dua) unit	Rp 18.250.000,00	Rp 17.296.500,00	94,78%	5,22%	Panggung Reklame 2 (dua) unit	Panggung Reklame 2 (dua) unit	0,02	0,02	100%	ef dan ev
40	Fasilitas Penyaluran Bantuan Keuangan dan sosial	131.470.000,00	130.170.000,00	288 kali	288 kali	Rp 456.493,06	Rp 451.979,17	99,01%	0.9%	288 kali	288 kali	2,88	2,88	100%	ef dan ev
41	Kodivikasi dan Standarisasi Nomenklatur Pengangara	52.465.000,00	52.465.000,00	125 Buku	125 Buku	Rp 419.720,00	Rp 419.720,00	100%	-	125 Buku	125 Buku	1,25	1,25	100%	sesuai Harapan
42	Pemutakhiran Database Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	93.765.000,00	93.765.000,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 46.882.500,00	Rp 46.882.500,00	100%	-	100%	100%	0,02	0,02	100%	sesuai Harapan
43	Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Reklame	41.051.000,00	38.351.000,00	48 kali pengawasan	48 kali pengawasan	Rp 855.229,17	Rp 798.979,17	93,42%	6,58%	100%	100%	0,48	0,48	100%	ef dan ev
44	Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	350.851.000	189.143.400,00	105 SKPD	105 SKPD	Rp 3.341.438,10	Rp 1.801.365,71	53,91%	46,09%	100%	100%	1,05	1,05	100%	ef dan ev

# STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD

